

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Asdar Mono (1), Rijel Samaloisa (2)

(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Email Korespondensi: Asdarmono250@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kalurahan Condongcatur yaitu mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desanya sendiri dan agar menjadi lebih baik dan keterlibatan masyarakat harus aktif dalam pembangunan. Berawal dari temuan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai dengan tujuan peneliti ini. Pemerintah kalurahan Condongcatur dan mendorong partisipasi masyarakat secara umum sudah paham kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Partisipasi masyarakat terlibat cukup aktif, namun belum mampu memberikan data dan informasi menyeluruh. Dalam melaksanakan strategi pemerintah kalurahan Condongcatur mengalami kendala yang meliputi kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.

Kata kunci; Partisipasi; Masyarakat; Pembangunan.

Abstract: This study explains community participation in development in the Condongcatur sub-district, namely encouraging community participation to build their own village and to make it better and community involvement must be active in development. Starting from these findings, researchers are interested in knowing how community participation in development is in the Condongcatur Village, Kapanewon Depok, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. To explain community participation in development, this study uses a qualitative descriptive research method. Data collection methods were carried out through interviews and observations with the selection of informants in accordance with the objectives of this researcher. The government of the Condongcatur sub-district and encouraging public participation in general already understands the development activities that are carried out every year. Community participation is quite active, but has not been able to provide comprehensive data and information. In implementing the government's strategy, the Condongcatur sub-district experienced obstacles including a lack of budget funds and public awareness that was not optimal.

Keywords: Participation; Public; Development.

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai pasal 1 ayat 2 artinya penyelenggaraan Pemerintah yang berperan dalam kepentingan masyarakat setempat sesuai sistem pemerintahan yang ada di negara kesatuan republik Indonesia. Penjelasan dari pemerintrah desa sebagai dari bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana ke pemerintahannya dibawah langsung dari pemerintah kabupaten atau daerah. Fungsi dari adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pelayan pembina, pengayom dan menggerakkan peran serta masyarakat. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2016 pasal 24 berbunyi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan pada asas, kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemerintah, tertip untuk kepentingan umum transparansi, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi.

Pemimpin Desa atau Kalurahan yang ada di Indonesia dinamakan Kepala Desa atau Lurah dan juga sebagai pimpinan tertinggi pada pemerintahan Kalurahan. Wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman terdapat



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kalurahan Condongcatur dimana kepala Desa yang menjabat adalah bapak Reno Chandra Sangaji, S.IP. Kalurahan Condongcatur terbagi menjadi 18 Padukuhan 64 Rukun Warga (RW), 208 Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah penduduk yang ada di Kalurahan Condongcatur sejumlah 37.179 jiwa pada Tahun 2015.

Pemerintah desa tidak cukup untuk menyampaikan aspirasi masih ada aspirasi-aspirasi belum terwakili untuk masuk kemudian menjadi poin penting termasuk pertimbangan dalam menceraikan sebuah permohonan di desa. Strategi baru pemerintah desa yang di buat untuk bisa mengakomodasi lagi suara-suara selama ini yang tidak sempat terakomodasi dalam pencerahan-pencerahan formal. Pemerintah yang terbuka untuk melibatkan masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan paling tidak ada komunitas-komunitas yang kemudian dijadikan sebagai salah satu titik simpul yang bisa digerakkan memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam rangka merencanakan untuk menjawab persoalan di masyarakat. Pembangunan yang ada di Desa Condongcatur supaya betul-betul tepat sasaran tidak salah langkah dan salah arah. Makanya desa menginisiasi untuk membuat strategi dalam rangka memaksimalkan masukan yang diperoleh dari tingkat result.

Peran serta masyarakat sebagai pendorong dalam pembangunan di Desa bisa terwujud dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Musrembang itu sendiri adalah alat yang digunakan sebagai penjarang aspirasi sebanyak-banyaknya dan penjarang peran serta masyarakat. Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan pemerintah kalurahan menampung dan mewujudkan pembangunan baik pembangunan fisik atau non fisik yang berasal dari bawah dapat diusulkan pada pelaksanaan musrembang dikarnakan muswarah perencanaan pembangunan sebagai salah satu forum umum untuk menampung hal tersebut. Disamping itu musrembang bisa juga dilaksanakan pada tingkatan pemerintah kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi dibantu oleh elemen tokoh masyarakat di wilayah tersebut.

Jadi pemerintah condongcatur ini dalam menentukan pembangunan betul-betul berasal dari usulan masyarakat melalui RT, RW, nanti dirumuskan ditingkat padukuhan. Program Padukuhan adalah program unggulan dari pemerintah kelurahan yang disusun oleh masyarakat di tingkat Rt, Rw sehingga mereka mengusulkan kemudian pemerintah betul-betul mendorong program tersebut, maka yang terjadi adalah partisipasi masyarakat menjadi besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukum hingga saat ini selalu menjadi perdebatan ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 32/2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan atau hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antara kekuatan politik di level desa. Perubahan ke arah interaksi yang demokratis itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran biokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam UU yang baru. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiyadat, membuat peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa; dan (3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintah dan pembangunan di desa tidak lagi bermula dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ruang Publik

Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik.

Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dst) publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dst) keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Jadi kita dapat tarik kesimpulannya bahwa ruang publik bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat warga. Kita tidak dapat membatasi ruang publik, ruang publik ada di mana saja. Di mana ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitu hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik, oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dikarenakan kondisi yang diteliti masih tergolong alamiah dilingkungan yang di dalamnya ada cara pemerintah desa sebagai pendorong peran serta masyarakat pada pembangunan. penelitian ini berlokasi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang mana dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2022. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menjelaskan karakteristik dari objek, orang, sekelompok orang, lembaga, lingkungan, kejadian, atau keadaan yang menyeluruh serta terperinci. (Lubis dkk, 2019). Sehingga tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini untuk mendiskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Pemilihan lokasi dengan metode purposive dilakukan karena mampu memberikan gambaran yang bersifat khusus atas fenomena yang terjadi pada penelitian yang dilakukan. Sedangkan penentuan sampling dengan metode snowball sampling yang digunakan untuk menentukan narasumber supaya yang menjadi narasumber benar-benar kompeten untuk memberikan informasi sesuai dengan tema yang di teliti. Adapun jumlah informan adalah 13 orang yang meliputi komponen dari Lurah, Staf LMP, PKK, BPKal, KWT, Karang Taruna, Hubungan Masyarakat, Paguyupan PAUD, Tokoh Masyarakat, Camat, Dukuh dan Babinkantimas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penggunaan observasi sebagai sumber data penelitian karna data yang didapat jauh lebih lengkap lebih detil dan bisa melihat sampai tingkat pemahaman atau makna pada setiap perilaku yang ada (sugiyono, 2013:64). Wawancara dibutuhkan untuk mengarahkan kepada seseorang, peristiwa, aktifitas, lembaga, semangat, perasaan dan lainnya yang dilaksanakan dua orang yakni yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan sesuai yang di teliti kepada narasumber. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini supaya bisa sebagai penguji, penafsir, dan memprediksi kegiatan dokumentasi dilakukan sebagai upaya yang terkait pada peran serta masyarakat di dalam pembangunan fisik maupun non fisik di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pembangunan

Pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Didalam pembangunan, terdapat unsur-unsur perubahan, tujuan, dan potensi. Unsur perubahan merupakan perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan. Unsur tujuan yaitu tujuan yang hendak diarahkan oleh manusia untuk kelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Unsur potensi yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat dan kemudian dapat digunakan untuk membiayai perencanaan. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan unsur-unsur tersebut diperlukan adanya realisasi yang nyata dalam pembangunan.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintahan, seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi. Pembangunan non fisik meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, karena dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

melakukan pembangunan fisik. Oleh sebab itu, pembangunan tidak lepas dari ruang. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya mengembang gerak, interaksi, difusi dan arus yang memerlukan ruang. Tanpa adanya ruang, maka pengembangan tersebut tidak dapat disebut sebagai pembangunan.

“Pembangunan ada dua macam ada pembangunan fisik dan non fisik dua-duanya kita garap semampunya semua jawaban positif, karena lurah tidak pernah melakukan satu keputusan sendiri atau dengan anggota lembaga. Bapak dengan pengurus LPM dan mengambil sikap keputusan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi kenapa karena hampir keseluruhan kebijakan pembangunan fisik yang ada di kalurahan condongcatur muaranya dari masyarakat. Karena ada proses istilah pramusduk (musyawarah padukuhan) yang mulai tahun 2022 ini besiknya tidak lagi di padukuhan tapi sekarang besiknya di Kalurahan, mungkin condongcatur satu-satunya kalurahan yang pembangunan fisik non fisik yang berbasis elit, mulai tahun 2022 setiap RW itu mendapat dana dari Kalurahan ADD itu 40 Juta kali dengan 64 RW kalau dulu besiknya di padukuhan yang berjumlah 18 yang dulu rata-rata setiap satu padukuhan mendapatkan 70 – 100 juta. Ada perubahan yang luar biasa ditingkat RW jadi program itu kalau dulu pramusduk (pramusawarah Padukuhan) yang dihadiri oleh ada ketua RT, perwakilan PKK Ibu-ibu, perwakilan Pemuda, tokoh masyarakat disitu semua terlibat. Dari pramusduk itu ada beberapa gambaran oh sekarang ini padukuhan ini sekarang kita pembangunan jalan, jalannya berapa meter lebar berapa meter permeter berapa bajatnya nanti muncul. Baru nanti diputuskan dari musduk yang hadir juga sama tidak satu atau dua orang semua elemen masyarakat itu terlibat.”

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kalurahan Condongcatur Dalam Pembangunan

Ketigabelas informan memberikan jawaban yang hampir sama, bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan melalui pemberian ide dan gagasan, uang, dan tenaga dalam memberikan dukungan untuk pembangunan di kalurahan mereka.

Masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui ruang publik yang merupakan inisiatif warga lalu direalisasikan oleh pemerintah kalurahan. Tujuan ruang publik ini sendiri dipakai pemerintah dalam berkampanye di bidang politik. Jadi saat ruang publik menjadi sebuah idola bagi para calek representasi partai politik mengenai bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat secara langsung. Ruang publik inilah pula yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan gagasan-gagasan untuk pembangunan di kalurahan setempat.

“Kontribusi masyarakat dalam program kegiatan pembangunan, secara keseluruhan kontribusinya sangat besar baik pemikiran, biaya, tenaga ini menurut saya sangat besar. Kenapa saya katakan seperti itu ketika kita hanya memberikan dana 1 M (milyar) saja kita sampaikan kemasyarakat ketika diwujudkan sebuah program itu bisa 2 M (milyar) lebih uang dari mana itu kalau bukan dari kontribusi dari masyarakat itu terjadi disemua tempat dan kita ini sangat bangga sekali dengan masyarakat kita. Kita yang diberikan sebagai kepercayaan itu pak ini ada gedung dananya desa hanya sekian oh siap pak nanti kita carikan.”

Reno Candra Sangaji, S.IP selaku Lurah Condongcatur menilai bahwa masyarakat sangat besar memberikan kontribusi dalam proses pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Masyarakat setempat benar-benar memberikan curahan tidak hanya sekedar omongan belaka melainkan juga waktu, tenaga bahkan sampai uang dalam membantu terwujudnya pembangunan di kalurahan tersebut. Kontribusi ini tentunya membuat pembangunan berkembang karena tujuan yang diberikan tidak sekedar saja dari masyarakat di kalurahan condongcatur.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kalurahan Condongcatur

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Sesuai dengan focus pembahasan pada tulisan ini, maka Lurah selaku pemerintah di Kalurahan harus mengupayakan tindakan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian, segala proses pembangunan yang dilakukan baik di jalur pemerintahan, maupun secara kemasyarakatan harus melalui aspirasi/ide/gagasan yang disampaikan oleh masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Strategi yang kedua adalah bagaimana masyarakat itu juga memperhatikan apa yang tentunya menjadi program kerja pemerintah kalurahan jadi dengan cara kita memberikan bantuan yang betul-betul dibutuhkan saya yakin dan percaya masyarakat itu akan betul-betul memaksimalkan bantuan dari pemerintah. Kemudian disitulah ada sebuah hubungan yang betul-betul hubungan emosional kenapa karena pemerintah disini sebagai petanggungjawab mengelola keuangan memberikan bantuan. Kemudian masyarakat yang mengusulkan sesuai apa yang mereka usulkan ini salah satu pertemuan yang luar biasasehingga program-program yang di rencanakan apa bila masyarakat betul-betul membutuhkan itu insyaallah akan selesai dan kedepannya setelah jadipun



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

masyarakat akan memeliharanya program-program telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Itu salah satu itu nanti kita turun kebawah kemudian penganggaran kita langsung kemasyarakat.

Yang ketiga adalah bagaimana pengawasan terhadap program itu betul-betul bisa menjadi kewajiban berdua antara pemerintah kalurahan dan msayarakat juga menerima bantuan. Salah satu partisipasi yang menonjol adalah bangunan yang sudah selesai masyarakat itu setelah pasrtisipasi mereka menggunakan dana swadaya itu memelihara gedung-gedung paud, gedung pertemuan, memelihara saluran yang telah kita bangun bersama itu salah satunya masyarakat itu istilanya setelah diberikan fasilitas kemudian memelihara atau menjaganya. Sehingga keberlangsungan itu lebih lama dan lebih langgeng sehingga manfaat dari pembangunan itu bisa dirasakan hingga 1,2,3 tahun tapi mungkin bisa digunakan pada kurang waktu tertentu.”

Wawancara dengan Lurah Condongcatur bapak Reno Candra Sangaji, S.IP, menunjukkan bahwa dalam Startegi yang dimunculkan oleh pemerintah dalam mendorong masyarakat condongcatur juga perlu diacungi jempol. Karena seyogyanya, keduanya saling keterkaitan baik pemerintah maupun masyarakat sehingga diperlukan adanya kerja sama yang baik oleh keduanya untuk mencapai pembangunan sesuai harapan. Seperti dijabarkan diatas, bahwa kepercayaan satu sama lain adalah penunjang yang membuat pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, suara masyarakat yang juga dipertimbangkan oleh pemerintah penting dalam pembangunan.

Kemudian, pemerintah setelah mendapatkan gagasan dari masyarakat memberikan fasilitas dan melakukan pengawasan untuk pembangunan yang mana amanah tersebut benar-benar adanya diwujudkan. Bisa dilihat bahwa masyarakat condongcatur ddpdapat dikatakan memiliki loyalitas tinggi sampai berpartisipasi tidak hanya segi tenaga tapi juga materi. Kondisi ini tentu sudah seharusnya membuat pemerintah menjaga dengan baik amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan kalurahan condongcatur.

Pembangunan Di Kalurahan Condongcatur Dikaitkan Dengan Konsep Teori Ruang Publik Habermas

Kata Publik (*public*) berasal dari nahasa latin yaitu “*publicus*”. Dalam masyarakat Romawi Kuno, kata *publicus* mengandung dua arti, yaitu milik rakyat sebagai satuan politis atau milik Negara; dan sesuai dengan rakyat sebagai seluruh penduduk atau kata lain untuk “umum”. Kedua makna tersebut menyiratkan dua hal yaitu suatu ruang tempat hal-hal umum dibicarakan dan suatu subjek hukum, yakni rakyat.

Habermas berpandangan bahwa ruang public berkaitan dengan aktivitas suatu komunitas bahasa, dan bahkan dengan akal sehat manusia, maka ia sebuah ruang yang terbentuk lewat interaksi dan komunikasi sosial (Hardiman,2010). Ruang public adalah wahana dimana setiap kepentingan terungkap secara gambling. Setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dan terdorong untuk mendahulukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus mengenai arah masyarakat tersebut ke depan dan menemukan solusi bersama dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara, teori ruang public Habernas ini digunakan dalam partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide/gagasan, kritik dan saran kepada pemerintah. Dalam praktiknya dilakukan melalui adanya musduk (musyawarah padukuhan), dan forum musyawarah untuk manjarig aspirasi masyarakat.

“jadi dari namanya kita ada musduk musyawarah padukuhan, musyawarah kampung, musyawarah RT itu yang formal itu memang dilaksanakan secara berkala bagaimana kita meminta usulan dari masyarakat secara resmi dilingkup RT, RW atau Pemuda. Kemudian yang gak resmi ya itu tadi ketika kita menghadiri sesuatu upacara tahzia kematian kita ketemu orang-orang yang mereka bebas bercerita. Kemudian kita di pos kampling ketemu orang tua-tua yang lagi ronda mereka perlukesah itu salah satu saluran. Kemudian kita di daftar dalam satu grup misalnya kita didalm satu grup KWT kelompok tani, grup pertenakan itu pun timbul pembicaraan, grup olahraga semua ada jadi itu saluran yang perlu kita pertimbangkan itu bisa mengeluarkan kebijakan bagi pemerintahan kalurahan. Kita ada yang resmi kemudian yang gak resmi juga ada kalaupun itu menjadi sebuah tulisan sudah menjadikan kita pemikiran untuk mejadikan program kita.

Mereka yang memberikan ide atau saran bagaimana kelanjutan ide dan saran. Jadi begini saran atau ide bahkan kritik ini bagi pemerintahan kalurahan adalah suatu yang positif karena ada orang yang peduli terhadap kinerja pemerintahan. Pak ternyata ini tidak bagus pak jangan dilanjutkan pak ini bagus sekali jangan hanya satu periode pak dua periode nanti kita jalankan pak, pak ini butuh penambahan pak, pak ini butuh pengurangan pak dan sebagainya. Ini salah satu kritik dasaran dan kemuidan kita harus bisa merespon kritik saranatau ide-ide itu dengan bijaksana lagi karena kenapa masyarakat sudah memikirkan segitunya dan kita disini sebagai pengelola kebijakan untuk merespon sebaik-baiknya. Jangan sampai kita fokus kemudian kita tekan juga karena itu kita tersinggung kita baperan itu gak boleh karena mereka ril dari masyarakat.”



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa musyawarah dan mufakat sebagai salah satu bentuk adanya ruang publik yang dibuka seluasnya untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, ide, maupun gagasan serta kritik dan sarannya kepada pemerintah, sehingga dengan adanya komunikasi yang terbuka dan berjalan secara sehat antara masyarakat dengan pemerintah maka akan memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan tanggungjawabnya dalam melakukan pembangunan.

Pemerintah Kalurahan Meningkatkan Partisipasi Warga Di Musrenbangdes

Partisipasi dalam pembangunan di Kalurahan Condongcatur untuk mengembangkan kemandirian masyarakat demi akselerasi pembangunan. Kepedulian masyarakat cukup baik dalam menanggapi pembangunan sangat penting dan memberikan dampak dalam mempengaruhi tahapan selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan demi menjaga serta memelihara hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan partisipatif ini juga merupakan keterlibatan masyarakat antara dari pemerintah dan masyarakat bawah. Pembangunan partisipatif dilihat dari tingkatan makro yang bersifat *“top down”* dengan tingkatan mikro yang kontekstual dan bersifat *“bottom up”*. Perencanaan ini yang dilakukan untuk mengembangkan program perencanaan dari bawah sampai ke tingkat atas. Dalam pembangunan partisipatif, tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan persoalan dan perumusan kebutuhan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku pembangunan yang terlibat. Dimana seluruh proses pembangunan sekaligus merupakan proses belajar bagi tiap pihak yang terlibat. Dalam partisipasi warga tersebut melalui berbagai proses, mekanisme dan tahapan penggalian dan jaring aspirasi dari tingkat bawah yaitu RT, RW, Dusun/Padukuhan yang diikuti oleh seluruh komponen dan unsur masyarakat.

Musrenbangdes kegiatan perkumpulan warga desa untuk membicarakan permasalahan yang ada di desa. Musrenbangdes bisa terlaksana dan berjalan dengan baik dan berkualitas apabila dipersiapkan dengan baik pula melalui koridor dan mekanisme yang seharusnya serta komitmen pemerintah desa.

“Sebelum dilaksanakan Musrenbangdes, kami selaku pemerintah desa telah menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan Musyawarah yang terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga Desa, dengan susunan anggota dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi materi, seksi logistik, dan pemandu untuk menyiapkan segala urusan Musrenbangdes. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti terlaksanakan dengan baik dan apa yang disampaikan bisa terlaksanakan.”

Dari informasi yang disampaikan oleh Lurah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persiapan musrenbangdes oleh kalurahan sudah di kawal dan direncanakan dengan baik sejak tahapan awal yaitu dengan menyiapkan penyelenggaraan Musyawarah oleh pemerintah kalurahan yang akan bertugas menyiapkan dan memfasilitasi segala keperluan pelaksanaan Musrenbangdes sehingga masyarakat yang hadir bisa menyampaikan partisipasi dengan baik.

“Dalam Musrenbangdes merupakan titik akhir musyawarah warga yang sudah diawali dari Musduk di tingkat Padukuhan yang melibatkan unsur-unsur RT, RW, Tokoh Masyarakat, Pemuda/Karang taruna, PKK yang mewakili masyarakat kemudian hal tersebut dilanjutkan dalam Musdes (Musyawarah Desa) dan setelah dinyatakan sepakat nantinya akan di sampaikan dalam Musrenbangdes. Didalam Musrenbangdes inilah program pembangunan baik pembangunan fisik dan non fisik yang berasal dari masyarakat di rencanakan, baik pembangunan fisik maupun non fisik semua berasal dari masyarakat di rencanakan, baik menjadikan penyemangat dari masyarakat ketika mereka memiliki sebuah program pemerintah mendukung dan memfasilitasi. Rapat yang diselenggarakan BPD antara lain Musyawarah Intern BPD, Musyawarah BPD dengan Pemerintah yang sifatnya Koordinasi maupun evaluasi dan Musyawarah Desa. Untuk Partisipasi rapat tersebut di Kalurahan Condongcatur partisipasinya sudah sangat bagus”.

Informan di atas kita ketahui bahwa Musrenbangdes telah dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur dengan mengundang perwakilan dari masing-masing Padukuhan, Lembaga Desa, BPD, Perangkat Desa. Artinya semua unsur dari semua wilayah Padukuhan dan unsur lembaga desa sudah diajak terlibat untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat Padukuhan.

Pertanyaan beberapa informan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Musrenbangdes di Kalurahan Condongcatur sudah terlaksana sesuai mekanisme yang ada, yaitu pihak Pemerintah Kalurahan sudah mengundang secara resmi unsur-unsur terkait, baik itu perwakilan dari padukuhan (RT, RW), lembaga-lembaga desa (karang taruna, PKK, LPM, BPD) tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir untuk melaksanakan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pertemuan kegiatan musrembangdes agar proses perencanaan pembangunan betul-betul terlaksana secara partisipatif sehingga perencanaan pembangunan berdasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat.

Seperti kita ketahui bahwa partisipasi pembangunan masyarakat merupakan kebersamaan keterlibatan dari diri masyarakat yang sadar untuk terlibat kegiatan pembangunan agar tujuan yang dicapai berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Sehingga kegiatan partisipasi dibutuhkan kebersamaan dan kesadaran dalam memberikan respons terhadap pembangunan sehingga tujuan yang dicapai dan dapat bertanggung jawab atas hasil pembangunan. proses kegiatan musrembangdes dilakukan dengan bentuk partisipasi memberikan bantuan fisik, pemikiran, tanggapan, saran, dan ide untuk menyusun rancangan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang ingin dibangun bersama sehingga pembangunan yang di rencanakan tidak mengalami kegagalan dalam program pembangunan. oleh karena itu masyarakat sangat dilibatkan dalam pembangunan agar pencapaian bisa terealisasi dengan baik. Sehingga masyarakat menjadi percaya diri dengan dilibatkan dalam proses pembangunan karena keinginan masyarakat sendiri ikut mengusulkan program pembangunan sehingga mereka akan lebih mengetahui dan ada rasa memiliki serta memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut.

Kendala Kalurahan Dalam Partisipasi Masyarakat

Dalam melaksanakan strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah Kalurahan Condongcatur mengalami beberapa kendala, yang meliputi kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah membuat pembangunan terhambat. Kegiatan partisipasi memiliki beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan, kendala yang dihadapi dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang bersifat dapat menghambat keberhasilan program.

Penulisan ini kita dapat melihat bahwa permasalahan yang memperlambat dan mempengaruhi misalnya faktor usia, terbatasnya ekonomi, kurangnya pengetahuan, susahny dapat pekerjaan dan pendapatan penghasilan. Kendala yang dihadapi masyarakat dengan ini peneliti menyimpulkan yang menjadi kendala ialah tingkat partisipasi masyarakat yang belum bergantung satu sama lain sehingga mempengaruhi proses pembangunan.

Sebelum menyusun sebuah perencanaan, diawali dengan pengenalan persoalan yang dihadapi masyarakat dari level terbawah atau level basis. Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat.

“Harus mendengar suara dari paguyuban PAUD masalah pembangunan di desa Condongcatur, jelas ada karena memang paguyuban PAUD Condongcatur itu kita menaungi PAUD non formal di bawah PKK jadi SPS yang notabnya berbasis masyarakat semuanya dibiayai masyarakat. Pendidikan PAUD kita ambil murni dari kader setempat yang dilihat sedemikian rupa untuk jadi guru PAUD jadi memang tidak ada besik guru PAUD disana hanya beberapa orang saja besik guru. Saya juga tidak memiliki besik guru makanya dari situ harus belajar sementara tuntutan pendidikan sedemikian rupa apa lagi sekarang PAUD sudah disejajarkan formal dan non-formal itu sejajar sarat dan ketentuan berlaku. Kedinas Pendidikan sarat ketentuan berlaku dan otomatis SI linier. Padahal yang kita di non-formal SPS (satuan PAUD sejenis) itu cuma lulusan SMA tidak linier latar belakang kader diploma permasalahan utamanya disitu dan juga sarana prasarana.”

Dari informan yang di atas, salah satu guru PAUD menyampaikan data dan informasi tentang permasalahan fasilitas pendidikan yang masih belum tersediakan yaitu sarana prasarana awalnya satuan PAUD sejenis (SPS) karena kegiatan yang terintegrasi dengan Posiandu dan Posiandu itu hanya pertumbuhan sementara perkembangan anak itu diabaikan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak harus seiring sejalan kemudian pemerintah membuatkan program PAUD yang bisa diakses masyarakat luas dengan biaya yang lebih murah. Namun di Kalurahan Condongcatur meningkatkan potensi di gelar uji kopetensi jadi guru PAUD yang tidak linier itu bisa dilaksanakan dengan uji kopetensi semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan.

“Ya kendala itu pasti ada, jadi kendala yang sering kita hadapi di dalam pengembangan desa condongcatur yang pertama tentunya masalah bagaimana anggaran yang kita punya kemudian pemanfaatan yang cocok untuk masyarakat seperti apa yang mampu melibatkan masyarakat. Permasalahan partisipasi yang mempengaruhi masyarakat dalam mengabil suatu keputusan sehingga kita membebaskan kegiatan pelaksanaan program pembangunan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.”

Di Kalurahan Condongcatur dalam partisipasi pembangunan masyarakat sudah di sediakan tempat berkumpul atau ruang, dari orang tua, remaja, pemuda dan perempuan dalam memberikan masukan ide dan saran.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Disimpulkan bahwa permasalahan partisipasi menjadi faktor pertama dalam mengambil keputusan bersama. Sehingga pemerintah kalurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang dibutuhkan sebagaimana yang diharapkan.

“Ya saya melihat kendala yang di hadapi dalam pengembangan Desa Condongcatur ini adalah positif dan negatif, karena kendala Condongcatur itu sudah faktanya perkotaan tetapi yuridisnya masih perdesaan. Penduduk Desa Condongcatur dengan jumlah penduduk sekitar 50.000 jiwa dan belum lagi penduduk yang berasal dari wilayah luar yang tinggal di Condongcatur, merupakan masyarakat yang heterogen dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi.”

Dari pernyataan informan di atas menegaskan bahwa pengembangan Kalurahan Condongcatur memiliki mobilitas yang tinggi dalam hal pembangunan sehingga masyarakat menginginkan pembangunan yang merata dan sarana prasarana yang memadai seperti jalan yang bagus. sehingga orang-orang atau penduduk anggota masyarakat peduli dalam pengembangan Kalurahan Condongcatur adalah masyarakat-masyarakat yang sudah lama tinggal di Condongcatur dan penduduk asli Condongcatur.

“Masalah yang dihadapi penyanda Disabilitas adalah masih banyaknya jalan yang kurang baik dalam melancarkan akses transportasi masyarakat apa lagi kami sebagai penyanda Disabilitas susah untuk melewati jalan yang bergelombang dan berlubang. Kebutuhan yang diperlukan yaitu pembangunan fisik terutama jalan yang merupakan hasil musyawarah lingkungan setempat.”

Dari berbagai pendapat informan tersebut, hampir semua masalah yang dirasakan dan disampaikan adalah persoalan sarana dan prasarana lingkungan maupun pembangunan, artinya sebagian besar wilayah di Kalurahan Condongcatur masih menghadapi persoalan pemerataan pembanguana fisik yaitu gedung dan sarana transportasi. Selain itu juga kemampuan masyarakat dalam mengenali persoalan masih lemah, dan cenderung cari yang mudahnya, sehingga persoalan yang dikemukakan baru persoalan sarana prasarana fisik dan lebih kearah usulan semata, bukan murni penggalian masalah dan kebutuhan, sehingga data dan informasi mengenai persoalan, masalah, potensi dan kebutuhan belum maksimal.

Penyampain informasi dengan tulisan adalah perencanaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dengan melihat kondisi dilingkungan masyarakat, namun belum dapat memperkuat perencanaan tersebut juga disampaikan secara lisan perdebatan di tingkat desa karena banyak usulan dari pihak lain. Kondisi seperti ini memerlukan sebuah interaksi yang baik dimana antar masyarakat saling ikut serta dan mampu memberikan saran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari informan kita mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. infromasi pelaksanaan kegaitan yang disampaikan belum di dasari dengan kebutuhan utama, sehingga program pembangunan tidak berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat, kebanyakan penentuan program yang dibangun berdasarkan kepentingan atasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sudah cukup baik terlibat dalam memberikan usulan kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga mampu untuk memberikan data dan informasi secara detail dan menyeluruh dalam partisipasi pembangunan di Kalurahan Condongcatur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut: Secara umum masyarakat Kalurahan Condongcatur sudah paham kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun di desanya. Sebagai upaya dalam mendorong partisipasi masyarkat dalam pembangunan kalurahan condongcatur, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang berperan penting dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Media sosial yang biasanya digunakan adalah whatsapp group, facebook, dan instagram. Penggunaan media sosial ini dapat digolongkan kepada *public space*. Kegiatan yang di lakukan oleh Kalurahan Condongcatur terlaksana sesuai mekanisme yang ada, yaitu pihak pemerintah desa sudah mengundang unsur-unsur baik secara tertulis maupun dengan lisan yaitu menggunakan media Group WhatsApp untuk hadir dalam kegiatan musrembangdes. Partisipasi yang dilakukan masyarakat keterlibatan sudah cukup baik dalam memberikan usulan kegiatan perencanaan pembangunan sehingga mampu menyelesaikan program pembangunan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah Kalurahan Condongcatur mengalami beberapa kendala, yang meliputi kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.

Partisipasi sangat terkait dengan keterlibatan semua pihak secara sadar dalam suatu proses pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu seluruh proses hendaknya melibatkan semua pihak dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan bersama. Partisipasi sangat didasari oleh tujuan untuk menghargai harta dan martabat manusia sebagai mahluk. Perlunya meningkatkan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kualitas dialog dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan Condongcatur dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dialog pada saat musrembangdes, dan forum-forum lain untuk mendorong partisipasi masyarakat agar lebih tertarik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga dapat meningkatkan kualitas dialog di media Group WhatsApp, Facebook, warung-warung kopi, di pos-pos ronda atau di angkringan yang biasa menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Soetomo, 2015, *pemberdayaan masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Drs. AG. Subarsono, M.si.,MA, 2016, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Pokok-Pokok dan sistem Pemerintahan Desa (teori, Regulasi, dan Implementasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Budi Hardiman, 2010, *Ruang Publik*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Lubis, Z., Manaf, A., Hj. Ahmad, H., Abdullah, M., Junoh, M. (2019), *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Sugiyono (2020), *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2010 *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta Arifin 2010.
- Radiansyah, Rifi Rivani. 2019. *Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas*
- Mondong, Hendra. 2013. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Governance



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.